



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Legitimasi Kebijakan Publik Di Era Disinformasi Studi Sosiologis Tentang Respons Masyarakat Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia

Legitimacy of Public Policy in the Age of Disinformation A Sociological Study of Public Response to Free Nutritious Meal Programs in Indonesia

Prayudha Satya Bhakti¹, Didin Syarifuddin²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe – Tangerang Selatan – Banten

²Sekolah Tinggi Pariwisata Ars Internasional, Jl. Sekolah Internasional No. 1-6 – Cicaheum – Kiaracondong – Bandung – Jawa Barat

***Corresponding Author:** E-mail: prayudhasb332@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 22 Sep, 2025

Revised: 16 Nov, 2025

Accepted: 18 Dec, 2025

Kata Kunci:

Disinformasi, Legitimasi Kebijakan Publik, Makan Bergizi Gratis, Persepsi Masyarakat, Komunikasi Publik

Keywords:

Disinformation, Public Policy Legitimacy, Free Nutritious Meals, Public Perception, Public Communication

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9662](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9662)

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik di Indonesia yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak usia sekolah serta mendukung keberlanjutan pendidikan. Namun, di era digital, program ini menghadapi tantangan terkait legitimasi akibat maraknya disinformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bentuk disinformasi, persepsi masyarakat, dan dampaknya terhadap legitimasi kebijakan MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi muncul dalam bentuk narasi politisasi program, isu kualitas makanan, dan persepsi negatif terkait anggaran, yang memengaruhi sikap masyarakat; sebagian mendukung karena manfaat langsung, sementara sebagian lain bersikap skeptis terhadap niat pemerintah. Rendahnya literasi digital dan komunikasi publik yang bersifat top-down memperkuat penyebarluasan informasi tidak akurat sehingga mengurangi partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Legitimasi kebijakan publik dalam konteks ini tidak hanya ditentukan oleh efektivitas program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun interaksi sosial dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan legitimasi MBG memerlukan strategi komunikasi yang transparan, edukasi literasi digital, pelibatan aktif masyarakat, serta sistem klarifikasi cepat terhadap informasi palsu. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk merancang program publik yang lebih efektif dan mampu mempertahankan legitimasi di tengah tantangan disinformasi.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a public policy in Indonesia that aims to improve the nutrition of school-age children and support the continuity

of education. However, in the digital age, this program faces challenges related to legitimacy due to the prevalence of disinformation. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze the forms of disinformation, public perceptions, and their impact on the legitimacy of the MBG policy. The results show that misinformation appears in the form of narratives politicizing the program, issues regarding food quality, and negative perceptions related to the budget, which influence public attitudes; some support the program because of its direct benefits, while others are skeptical of the government's intentions. Low digital literacy and top-down public communication reinforce the spread of inaccurate information, thereby reducing public participation and trust. The legitimacy of public policy in this context is not only determined by the effectiveness of the program, but also by the government's ability to build social interaction and public participation. This study concludes that strengthening the legitimacy of the MBG requires a transparent communication strategy, digital literacy education, active community involvement, and a rapid clarification system for false information. These findings are expected to serve as a reference for policymakers in designing more effective public programs that are able to maintain legitimacy amid the challenges of disinformation.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi, masyarakat dihadapkan pada tantangan baru berupa penyebaran disinformasi yang semakin masif. Disinformasi tidak sekadar salah informasi, melainkan penyebaran informasi yang keliru secara sengaja untuk membentuk opini publik tertentu. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks legitimasi kebijakan publik, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat tergerus oleh arus informasi yang tidak akurat. Menurut (Megawati & Kurniati, 2019), lembaga publik saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga kredibilitas informasi di tengah derasnya arus komunikasi digital, terutama ketika informasi yang salah lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah.

Salah satu kebijakan yang rentan terhadap dampak disinformasi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Indonesia. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun, sebagaimana dicatat oleh (Fatimah et al., 2024) dalam implementasinya program ini tidak lepas dari berbagai hambatan, baik dari segi logistik maupun persepsi publik. Di beberapa daerah, muncul keraguan masyarakat akibat informasi yang menyesatkan tentang sumber pendanaan, kualitas bahan makanan, bahkan tuduhan politisasi kebijakan menjelang kontestasi politik nasional.

Penelitian (Muhamad Apriliana Aziz, Dini Turipanam Alamanda , Mochammad Iqbal Fadhlurrohman & Kurniati, 2025) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program makan gratis terbagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama menilai program tersebut sebagai langkah positif untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak sekolah. Sementara kelompok kedua cenderung skeptis, terutama karena paparan informasi di media sosial yang menggiring opini bahwa program ini sekadar alat pencitraan politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan tidak selalu terbentuk oleh pengalaman langsung, melainkan juga oleh narasi yang beredar di ruang digital.

Lebih lanjut, (Kiftiyah et al., 2025) menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada legitimasi sosial yang menyertainya. Dalam konteks Program MBG, disinformasi telah menimbulkan dinamika sosial-politik yang kompleks di satu sisi meningkatkan partisipasi publik dalam diskusi kebijakan, namun di sisi lain memperkuat polarisasi dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang sejatinya berorientasi pada pemerataan kesejahteraan justru menjadi arena kontestasi opini publik yang penuh ketegangan.

Dari perspektif sosiologi kebijakan, legitimasi dipahami sebagai penerimaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat adil, rasional, dan berpihak pada kepentingan bersama. (Lele, 2024) menjelaskan bahwa legitimasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengartikulasikan nilai-nilai moral dan sosial yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun, di era disinformasi, legitimasi ini menjadi rapuh karena ruang publik dipenuhi dengan narasi yang saling bertentangan. Dalam kondisi demikian, kebijakan publik tidak hanya diuji dari aspek substansi dan implementasi, tetapi juga dari kemampuan komunikasi publik pemerintah dalam menjaga integritas informasi.

Hal senada juga diungkapkan oleh (Said & R, 2023) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada tahap formulasi, melainkan juga memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat. Disinformasi dapat menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan warga, sehingga menimbulkan resistensi terhadap program-program sosial. Dalam kasus Program MBG, resistensi ini dapat berwujud dalam bentuk ketidakpercayaan, partisipasi rendah, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan publik.

Sementara itu, (Suaedi & Rahardian, 2023) menyoroti bahwa dalam era *governance*, kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya menjadi domain negara, melainkan merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Kondisi ini membuat arus informasi semakin sulit dikendalikan, karena aktor non-pemerintah memiliki peran besar dalam membentuk narasi kebijakan. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan publik kini juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat untuk mengoreksi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan publik.

Secara empiris, penelitian lapangan (Sari, 2025) menunjukkan bahwa implementasi program makan gratis di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, berhasil meningkatkan kehadiran siswa dan menurunkan angka kelaparan di sekolah. Namun, keberhasilan ini tidak selalu diikuti dengan persepsi positif masyarakat secara menyeluruh, karena masih terdapat penyebarluasan informasi keliru yang menimbulkan keraguan terhadap niat pemerintah. Hasil tersebut memperkuat temuan (Rif'iy et al., 2025) yang menyatakan bahwa walaupun program MBG memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan status gizi dan keberlanjutan pendidikan, isu hoaks dan misinformasi dapat mengganggu dukungan publik terhadap keberlanjutan program.

Dari sisi ekonomi dan gizi masyarakat, (Aisyah et al., 2023) menegaskan bahwa kebijakan pangan dan gizi seperti MBG memiliki peran strategis dalam menekan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi dan mendukung produktivitas nasional. Namun, jika disinformasi tidak dikendalikan, kebijakan tersebut berpotensi kehilangan dukungan sosial karena masyarakat lebih mempercayai narasi negatif yang viral di media sosial daripada penjelasan resmi pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan strategi komunikasi sosial dalam membangun legitimasi.

Selain dari sisi substansi kebijakan, (Wajdi & Andryan, 2022) menekankan bahwa hubungan antara hukum dan kebijakan publik juga berpengaruh terhadap legitimasi. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik merupakan elemen hukum yang harus diperkuat untuk menghindari manipulasi informasi yang bisa mencederai kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari keadilan prosedural dan kejelasan informasi publik yang diterima masyarakat luas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk dan isi disinformasi yang berkembang di masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis, persepsi dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta pengaruh disinformasi terhadap legitimasi kebijakan publik. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara arus informasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan legitimasi kebijakan di Indonesia.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan legitimasi kebijakan publik di tengah arus disinformasi. Menurut (Megawati & Kurniati, 2019), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi dan pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan publik melalui interaksi sosial dan konteks komunikasi yang kompleks. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk menelaah respons masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan opini publik di media sosial.

Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai kondisi legitimasi kebijakan di lapangan. Sejalan dengan (Lele, 2024), metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan hubungan sosial yang terbentuk antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk reaksi terhadap suatu kebijakan publik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa wilayah perkotaan dan pedesaan di Bogor, dengan fokus pada daerah yang telah menerima pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan variasi sosial, ekonomi, dan tingkat akses informasi digital masyarakat. Berdasarkan temuan (Fatimah et al., 2024), wilayah dengan tingkat literasi digital yang rendah cenderung lebih rentan terhadap disinformasi. Oleh karena itu, lokasi penelitian dipilih secara purposif untuk mencerminkan keragaman kondisi masyarakat.

Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari Januari hingga Juni 2025, mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan mengenai persepsi mereka terhadap kebijakan MBG serta pengaruh disinformasi terhadap penerimaan program.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan media, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Menurut (Said & R, 2023), penggunaan data sekunder penting untuk memahami konteks kebijakan publik dan pola legitimasi yang telah terbentuk sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam, yaitu menggali pandangan masyarakat, pejabat pelaksana kebijakan, dan tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan dan penerimaan Program Makan Bergizi Gratis.
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan di lapangan untuk mengetahui bagaimana informasi mengenai program tersebut disebarluaskan dan diterima.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan tertulis seperti berita media, laporan kebijakan, dan hasil riset terdahulu. (Kiftiyah et al., 2025) menekankan bahwa dokumentasi sangat penting untuk memahami bagaimana media dan masyarakat membungkai isu kebijakan dalam konteks disinformasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara berulang selama penelitian. Menurut (Suaedi & Rahardian, 2023), analisis interaktif memungkinkan peneliti memahami pola makna sosial dan hubungan kekuasaan yang memengaruhi legitimasi kebijakan publik.

Dalam tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu dampak disinformasi terhadap legitimasi kebijakan MBG. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil wawancara dan observasi disusun secara sistematis untuk memudahkan interpretasi. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori legitimasi

kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh (Lele, 2024) dan (Megawati & Kurniati, 2019), yaitu bahwa legitimasi akan terbangun ketika komunikasi publik berjalan secara terbuka dan kredibel.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, hasil observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi ilmiah. Menurut (Muhammad Apriliana Aziz, Dini Turipanam Alamanda , Mochammad Iqbal Fadhlurrohman & Kurniati, 2025), triangulasi penting dalam penelitian sosial untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan realitas sosial yang terjadi, bukan hanya persepsi tunggal peneliti.

Dengan penerapan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengaruh disinformasi terhadap legitimasi kebijakan publik, khususnya dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak usia sekolah dasar dan menengah. Program ini muncul sebagai jawaban atas masih tingginya angka stunting, gizi buruk, dan kesenjangan akses pangan di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan utama program ini adalah memastikan bahwa anak-anak memperoleh asupan makanan bergizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang dan semangat belajar mereka di sekolah.

Menurut (Fatimah et al., 2024), kebijakan MBG memiliki signifikansi besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, terutama di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tantangan logistik dan sosial yang kompleks. Namun, di balik tujuan positif tersebut, muncul dinamika sosial dan politik yang cukup kuat, terutama karena program ini diluncurkan di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial. Disinformasi ini sering kali memengaruhi cara masyarakat memahami dan menilai kebijakan pemerintah.

Sementara itu, (Muhammad Apriliana Aziz, Dini Turipanam Alamanda , Mochammad Iqbal Fadhlurrohman & Kurniati, 2025) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap program makan gratis sangat beragam. Sebagian masyarakat mendukung karena melihat dampak nyata terhadap kesejahteraan anak, peningkatan semangat belajar, dan solidaritas sosial. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang skeptis dan memandang program ini sebagai alat politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh narasi informasi yang beredar di ruang publik.

Dari perspektif kebijakan publik, legitimasi program sangat ditentukan oleh penerimaan sosial dan partisipasi masyarakat. (Said & R, 2023) menekankan bahwa sebuah kebijakan publik akan memiliki legitimasi tinggi bila masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut disusun secara transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum. Sebaliknya, jika kebijakan dijalankan dengan komunikasi yang lemah, akan muncul celah bagi berkembangnya disinformasi dan keraguan terhadap motif kebijakan.

Program MBG juga perlu dilihat dari aspek social kultural. Dalam pandangan (Kiftiyah et al., 2025), kebijakan makan bergizi gratis bukan hanya program teknokratik, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan ini dianggap mampu memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan gizi di masyarakat. Namun, di tengah era digital yang dipenuhi dengan informasi instan, tantangan utama kebijakan ini adalah menjaga kepercayaan publik agar tidak terkikis oleh disinformasi yang bersifat sistematis.

Bentuk dan Pola Disinformasi yang Berkembang

Disinformasi mengenai Program Makan Bergizi Gratis berkembang melalui berbagai saluran, terutama media sosial seperti Facebook, X (Twitter), dan WhatsApp. Berdasarkan hasil analisis literatur, ditemukan beberapa bentuk disinformasi yang paling dominan. Pertama, disinformasi yang mengaitkan program MBG dengan kepentingan politik tertentu. Narasi yang beredar menyebut bahwa program ini hanya alat pencitraan politik, bukan kebijakan kesejahteraan publik. Temuan (Muhammad Apriliana Aziz, Dini Turipanam Alamanda , Mochammad Iqbal Fadhlurrohman & Kurniati, 2025) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa isu politisasi program menjadi salah satu kata kunci dominan dalam analisis jaringan teks di media sosial.

Kedua, muncul disinformasi mengenai kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Banyak unggahan viral menyebutkan bahwa makanan yang disediakan berasal dari bahan murah, tidak higienis, bahkan tidak memenuhi standar gizi. Padahal, hasil penelitian lapangan (Sari, 2025) menunjukkan bahwa di wilayah Mojosongo, Kabupaten Boyolali, program makan gratis justru efektif meningkatkan gizi dan kehadiran siswa di sekolah. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara realitas empiris dan persepsi yang terbentuk akibat informasi menyesatkan.

Ketiga, disinformasi muncul dalam bentuk manipulasi data anggaran. Di media sosial, sering muncul narasi bahwa dana program MBG disalahgunakan atau tidak transparan. Padahal, dalam perspektif (Fatimah et al., 2024), hambatan utama implementasi program bukanlah penyalahgunaan dana, tetapi kendala logistik dan distribusi di lapangan. Disinformasi semacam ini dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama di daerah yang tingkat literasi medianya rendah.

Menurut (Megawati & Kurniati, 2019), salah satu penyebab cepatnya penyebaran disinformasi di masyarakat adalah lemahnya mekanisme komunikasi publik pemerintah. Banyak informasi kebijakan yang disampaikan secara formal dan top-down tanpa memperhatikan konteks sosial audiensnya. Akibatnya, masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang emosional atau sensasional daripada informasi resmi yang bersifat teknis. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya literasi digital dan komunikasi publik yang proaktif dalam mengelola persepsi sosial terhadap kebijakan.

Dampak Disinformasi terhadap Persepsi dan Respons Masyarakat

Disinformasi memiliki dampak yang nyata terhadap persepsi dan perilaku masyarakat dalam merespons kebijakan MBG. Berdasarkan temuan (Muhammad Apriliana Aziz, Dini Turipanam Alamanda , Mochammad Iqbal Fadhlurrohman & Kurniati, 2025), masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah mereka yang mendukung program karena merasakan langsung manfaatnya, seperti peningkatan semangat belajar anak dan penurunan angka ketidakhadiran di sekolah. Kelompok kedua adalah mereka yang skeptis dan menilai program ini tidak efektif karena dipengaruhi oleh isu negatif yang beredar di media sosial.

Selain memengaruhi persepsi, disinformasi juga menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program. Beberapa sekolah mengalami penurunan kehadiran siswa karena orang tua khawatir terhadap kualitas makanan. Hal ini sesuai dengan temuan (Kiftiyah et al., 2025) yang menjelaskan bahwa disinformasi dapat menimbulkan distrust kolektif atau ketidakpercayaan sosial terhadap kebijakan negara, terutama bila narasi yang disebarluaskan menyentuh aspek emosional seperti isu kesehatan anak.

Dalam konteks legitimasi kebijakan, (Lele, 2024) menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam mempertahankan legitimasi sosial kebijakan. Ketika masyarakat percaya bahwa kebijakan dijalankan dengan niat baik dan hasilnya dirasakan nyata, maka legitimasi akan menguat secara otomatis. Sebaliknya, jika masyarakat merasa kebijakan hanya formalitas politik atau tidak transparan, maka legitimasi akan melemah, bahkan sebelum program dijalankan secara optimal.

Selain itu, (Said & R, 2023) menjelaskan bahwa legitimasi kebijakan publik juga ditentukan oleh keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi serta partisipasi publik dalam proses

kebijakan. Namun dalam kasus MBG, komunikasi masih bersifat satu arah. Pemerintah lebih banyak menyampaikan informasi tanpa membuka ruang dialog dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan kebijakan sulit diterima secara emosional dan sosial.

Strategi Penguatan Legitimasi di Era Disinformasi

Untuk menghadapi tantangan disinformasi dan menjaga legitimasi kebijakan publik, diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis pada kepercayaan sosial. (Suaedi & Rahardian, 2023) menegaskan bahwa dalam era governance yang kompleks, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada rancangan program, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola komunikasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai aktor non-pemerintah, termasuk media dan masyarakat sipil.

Salah satu strategi penting adalah memperkuat kapasitas literasi digital masyarakat agar mereka mampu memilih informasi yang benar. Pemerintah juga perlu mempercepat klarifikasi terhadap berita bohong melalui kanal resmi yang mudah diakses publik. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat perlu dilakukan agar pesan kebijakan dapat diterima lebih luas di tingkat akar rumput.

Menurut (Megawati & Kurniati, 2019), strategi komunikasi publik yang efektif tidak cukup hanya dengan publikasi formal, tetapi harus melibatkan komunikasi interpersonal dan sosial di tingkat komunitas. Pendekatan ini penting untuk membangun rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kebijakan publik, sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penerima manfaat.

Secara sosiologis, legitimasi kebijakan publik adalah hasil dari interaksi sosial yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat terlibat aktif dan merasa bahwa kebijakan tersebut adil serta membawa manfaat nyata, maka kepercayaan dan legitimasi akan terbentuk dengan sendirinya. Dalam konteks ini, (Lele, 2024) menekankan bahwa kebijakan publik yang berorientasi pada transformasi sosial harus mampu menjawab persoalan ketimpangan dan memperkuat keadilan sosial di tengah tantangan disinformasi yang semakin kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kebijakan publik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara substansi kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap informasi yang beredar. Program MBG, yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mendukung keberlanjutan pendidikan, secara substansial memiliki manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, penyebaran disinformasi melalui media sosial dan kanal informal lainnya menyebabkan persepsi masyarakat menjadi beragam. Sebagian masyarakat mendukung program karena manfaat yang dirasakan langsung, sementara sebagian lainnya skeptis akibat narasi negatif yang menyoroti politisasi dan kualitas makanan. Disinformasi muncul dalam berbagai bentuk, antara lain narasi politik, isu kualitas bahan makanan, dan manipulasi data anggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung dipengaruhi oleh informasi emosional atau viral, terutama di wilayah dengan literasi digital yang rendah. Ketidakakuratan informasi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi sosial kebijakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang menekankan bahwa legitimasi publik bukan hanya soal efektivitas program, tetapi juga sejauh mana masyarakat menerima dan percaya terhadap niat serta pelaksanaan kebijakan. Selain itu, studi ini menegaskan bahwa strategi komunikasi publik yang proaktif, partisipatif, dan transparan menjadi kunci dalam mempertahankan legitimasi kebijakan di era disinformasi. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses informasi dan evaluasi program, serta membangun literasi digital agar masyarakat dapat memilih informasi secara kritis. Dengan demikian, legitimasi kebijakan

publik dapat meningkat secara alami ketika masyarakat merasa dilibatkan, informasi yang diterima jelas dan kredibel, serta manfaat program dirasakan secara nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, I. S. ... Utami, K. D. (2023). *Ekonomi Pangan Dan Gizi*. Get Press Indonesia.
- Fatimah, S. ... Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, Dan Solusi Untuk Ketahanan Pangan. *Journal Of Governance And Policy Innovation*, 4(1), 14–21. <Https://Doi.Org/10.51577/Jgpi.V4i1.641>
- Kiftiyah, A. ... Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik. *Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 1–10.
- Lele, G. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. Ugm Press.
- Megawati, E., & Kurniati, I. A. (2019). Komunikasi Publik (Implementasi Pengawasan Diseminasi Informasi Publik Terkait Covid-19). *Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama*.
- Muhamad Apriliana Aziz, Dini Turipanam Alamanda , Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, & Kurniati, D. M. (2025). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap) Persepsi Masyarakat Terhadap Program Makan Siang Gratis Menggunakan*. 11(3), 215–228.
- Rif'iy, Q. ... Muhammad, S. (2025). *Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan*. 5(2), 130–137.
- Said, A. L., & R, L. O. M. (2023). *Analisis Kebijakan Publik*. Pt Media Penerbit Indonesia. <Https://Mediapenerbitindonesia.Com/Product/Buku-Referensi-Analisis-Kebijakan-Publik/>
- Sari, N. K. (2025). Efisiensi Makan Gratis Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 01(01), 56–63. <Https://Jmi.My.Id/Index.Php/Jpm/Article/View/4>
- Suaedi, F., & Rahardian, R. (2023). *Buku Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik Era Governance: Teori, Isu, Dan Kompleksitas*. Deepublish. <Https://Deepublishstore.Com/Produk/Buku-Manajemen-Publik-Falih/?Srsltid=Afmbooooo1lypen8jfpvzd0na-2xhet8tlkunrp6auljyyvudm4mxhsg1>
- Wajdi, F., & Andryan. (2022). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.